

BAB I

PENDAHULUAN

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai peran penting dalam kehidupan politik serta proses demokratisasi pada era Reformasi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh kedua organisasi. Kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ini tentu memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi di negeri ini. Terbukti, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh kedua organisasi ini telah mampu mewarnai kehidupan politik di negeri ini. Selain itu, kedua organisasi ini juga telah membantu proses pendewasaan para anggotanya untuk berdemokrasi.

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak negara Indonesia berdiri pada tahun 1945, kehidupan berpolitik rakyat Indonesia semakin berkembang matang. Proses pemilihan pemimpin negara Indonesia baik pemilihan legislative maupun pemilihan presiden menjadi agenda rutin mulai tahun 1995 sampai sekarang 2014. Agenda rakyat yang sering disebut Pesta Demokrasi telah membawa rakyat terbawa pada situasi dan kondisi persaingan politik baik secara individual maupun kelompok.

Demokrasi merupakan istilah yang mengacu pada sifat yang universal. Uniknya, tidak ada satu system demokrasi yang dapat diterapkan untuk semua bangsa atau negara. Demokrasi yang universal di semua negara mempunyai kesamaan hanya pada istilah, sedangkan isi dan perwujudannya dapat berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Menurut Sartori, demokrasi adalah

pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.¹ Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk membuat keputusan politik yang digunakan secara langsung melalui prosedur pemerintahan mayoritas yang biasa dikenal dengan sebutan Demokrasi langsung.

System politik dalam hal keseimbangan antara konflik dan konsensus terpelihara di dalam system demokrasi.² Proses yang demikian itu membawa pada kemungkinan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan di antara individu, antar kelompok, di antara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah. Akan tetapi demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Oleh sebab itu, sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada 'penyelesaian' dalam bentuk kesepakatan. Prinsip ini pula yang mendasari pembentukan identitas bersama, hubungan kekuasaan legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi.³

Makna Demokrasi diinterpretasikan oleh berbagai kalangan dengan multi makna sesuai dengan pemikiran dan penerapannya di masing-masing negara. Sebagian masyarakat mengartikan demokrasi adalah sebagai bentuk pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai subyek dan titik tumpu untuk segala kegiatan yang dikelolanya. Ada juga yang mengartikan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat bukan daulat pemimpin, daulat

¹ Giovanni Sartori, *The Theory of Democracy Revisted*, (New York: Chatam House, 1987), hlm. 5.

² Alfian Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 236. Lihat juga Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 228.

³ Ramlan, *Ibid.*

pemerintah, atau daulat raja. Demokrasi juga diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana warga negara menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi tetapi melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan pada batasan makna tersebut, dapat pula dirumuskan tentang ciri-ciri sebuah system demokrasi yaitu : (1) partisipasi politik yang luas, (2) kompetisi politik yang sehat, (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, melalui proses pemilihan umum, (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif, (5) diakuinya kehendak mayoritas, dan (6) adanya tata-krama politik yang disepakati dalam masyarakat. Ciri-ciri system demokrasi ini memberikan pengertian bahwa pemerintahan yang terbentuk dari system demokrasi tidak diperkenankan berlaku semena-mena terhadap rakyat sebagai komponen terpenting dari adanya pemerintahan tersebut.⁴

Demokrasi juga mempunyai ciri khas yang lain yakni adanya sikap tanggap pemerintah secara terus menerus terhadap keinginan rakyat dengan didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut : (1) kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi, (2) kebebasan mengemukakan pendapat, (4) hak memilih dalam pemilihan umum, hak menduduki jabatan publik, (5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara, (6) tersedianya sumber informasi alternatif, (7) Pemilu yang bebas dan jujur, dan (8) adanya lembaga-lembaga penjamin agar kebijakan publik tergantung pada suara pemilihan umum dan cara-cara penyampaian preferensi yang lain.⁵

Penerapan dan jenis system demokrasi di berbagai negara mempunyai perbedaan. Jenis-jenis demokrasi yang diberlakukan di beberapa negara sebagai

⁴ Sartori, *The Theory of ...*, hlm. 5.

⁵R. A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis. Antara Otonomi dan Kontrol* (Jakarta: Rajawali Press. 1985), hlm. 7.

berikut : 1) Demokrasi berdasarkan pada cara penyampaian pendapat terdiri dari a) demokrasi langsung yakni rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera didalam satu pertemuan, b) demokrasi tidak langsung atau Perwakilan yakni aspirasi rakyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat, c) demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat. Demokrasi ini merupakan gabungan dari demokrasi langsung dan tidak langsung dengan system yang dipakai rakyat memilih wakilnya untuk duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. 2) demokrasi berdasarkan pada titik perhatian dan prioritasnya terdiri dari a) demokrasi formal yang menempatkan semua orang pada kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Individu diberi kebebasan yang luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, b) demokrasi material yang memandang manusia mempunyai kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas, c) demokrasi campuran. Demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang

Jenis demokrasi selanjutnya adalah 3) demokrasi berdasarkan pada prinsip idiologi yang terdiri dari, a) demokrasi liberal yang memberikan kebebasan yang luas pada individu. Campur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warganya dihindari. Pemerintah bertindak atas dasar konstitusi (hukum dasar), b) demokrasi rakyat atau proletar yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal

perbedaan kelas. 4) demokrasi berdasarkan pada wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara terdiri dari a) demokrasi system parlementer yang bercirikan : DPR lebih kuat dari pemerintah, menteri bertanggung jawab pada DPR, program kebijaksanaan kabinet disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen, kedudukan kepala negara sebagai symbol, dan tidak dapat diganggu gugat. b) demokrasi sistem pemisahan/pembagian kekuasaan (presidensial) yang mempunyai ciri ciri : Negara dikepalai presiden, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat saling membubarkan

Demokrasi yang ada Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang dasar 1945 disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Falsafah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan. System Demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah system demokrasi Pancasila yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dalam bentuk musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan

permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual yang dilandasi nilai-nilai dasar negara yaitu Pancasila

Bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah system Demokrasi adalah pemilihan kepala negara. Di Indonesia, pemilihan presiden dilaksanakan pada masa orde lama, orde baru dan era reformasi. Pada masa orde lama dan orde baru system yang dipergunakan relatif sama yakni dilandaskan pada UUD tahun 1945 melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh anggota MPR . Model pemilihan tersebut bertahan sampai pemilihan presiden pasca mundurnya presiden Soeharto pada tahun 1998.

Tahun 2004 menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan politik di Indonesia dengan dilaksanakan pemilihan Presiden secara langsung dan berturut-turut pada tahun 2009 serta 2014. Mekanisme pemilihan Presiden secara langsung ini diatur di dalam Undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-undang RI No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.⁶

Proses pemilihan Presiden secara langsung sebagai sebuah system merupakan momentum yang sarat kepentingan dari berbagai pihak, baik partai politik, elit partai politik, elemen di masyarakat, ormas bahkan elit ormas termasuk Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern dengan slogan gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan mempunyai peran yang sangat strategis dalam dinamika politik khususnya pemilihan presiden secara langsung. Elit Muhammadiyah pada era ini masuk pada

⁶ Ign Ismanto, *Pemilihan Presiden secara Langsung 2004, Dokumentasi, Analisi dan Kritik*, (Jakarta: Galang Press Group, 2004), hlm. 109.

pusaran politik praktis yang deras sehingga terjadilah benturan hebat antara kepentingan elit Muhammadiyah dengan pola gerakan Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis. Adanya benturan tersebut menjadikan elit Muhammadiyah pada akhirnya mempunyai sikap yang plural. Banyak muncul perbedaan sikap yang tidak lagi mempunyai pola klasik antar sub kultur tradisional melawan modernis akan tetapi masalah yang muncul lebih kompleks karena sub kultur itu sendiri terpecah antara kelompok substansialis dan kelompok formalis.⁷

Pada sisi yang lain, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia juga masuk pada lingkaran dinamika politik nasional dan tidak bisa berlepas diri darinya. Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial-keagamaan (jamiyyah diniyyah-ijtimaiyyah) terbesar di negeri ini yang sebenarnya lebih fokus pada persoalan-persoalan kehidupan sosial-keagamaan para warganya. Secara historis, pada masa orde lama NU beralih tujuan menjelma menjadi sebuah parta politik sebagai wujud kekecewaan terhadap kelompok “modernis” yang lebih banyak mendominasi di tubuh parta Masyumi. Di sinilah NU menjadi salah satu organisasi yang berjalan dalam koridor sebagai organisasi sosial keagamaan yang ikut mewarnai kehidupan politik bangsa Indonesia. Perjalanan politik praktis NU berganti haluan ketika pada Mukhtamar di Situbondo, amanat mukhtamar pada saat itu merekomendasikan NU kepada pada Khittahnya menjadi organisasi sosial keagamaan serta mempunyai ruang gerak pada masalah-masalah keumatan. Hal tersebut terus berjalan sampai sekarang.

Warna politik di tubuh Muhammadiyah dan NU melekat dalam laju gerakan organisasinya. Hal ini juga berimbas pada elit Muhammadiyah dan NU

⁷Sudarno Shobron, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), hlm. 168.

baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah termasuk di Surakarta. Kegundahan dan sikap elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta khususnya pada proses pemilihan presiden secara langsung menjadi hal yang menarik untuk diteliti terkait dengan pola gerakan organisasi yang sama-sama mengusung gerakan dakwah amar makruf nahi munkar serta berlepas diri dari politik praktis, akan tetapi terdapat kebebasan bagi elit Muhammadiyah dan NU untuk berperan secara individu pada tataran politik praktis sehingga menimbulkan sikap yang beragam.

Ada dua alasan mengapa tema ini penting untuk dikaji. *Pertama*, berbicara tentang sikap politik di kalangan Elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta belum terlalu banyak. Pada kenyataannya, sikap politik elit Muhammadiyah di Surakarta tidaklah tunggal, melainkan plural. Gerakan Muhammadiyah yang bercorak modern, dinamis, dan progresif tidak selamanya berlaku normatif, bahwa aktivisnya pasti rasional. Faktor kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial dan tidak adanya satu komando juga mempengaruhi variasi sikap politik elit Muhammadiyah.⁸

Senada dengan apa yang terjadi pada elit Muhammadiyah di Surakarta, elit NU di Surakarta juga mengalami kondisi yang sama untuk bersikap politis khususnya pada pemilihan presiden secara langsung. Setelah era Reformasi dimulai, banyak para elit penting dari Muhammadiyah dan NU berbondong-bondong memasuki dunia politik. Bahkan, pada era ini sebagian besar elit dua organisasi ini bahkan juga mendorong untuk dibentuknya partai politik yang menjadi representasi dari organisasi massa Islam yang mereka anut. Oleh sebab

⁸ Suaidi Asyari, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah ; Over crossing Jawa Sentris*, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 139.

itu, lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai akibat dari dorongan para tokoh Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai akibat dari dorongan para tokoh NU. Kelahiran PAN dan PKB tentu berimbas pada sikap politik elit Muhammadiyah dan NU tidak hanya di tataran pengurus pusat akan tetapi juga pada sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta.

Kedua, penelitian ini memperkaya kajian tentang politik yang terjadi di negara berkembang, negara yang sedang menata diri menuju demokrasi yang dewasa, sehingga terwujud cita-cita luhur, yakni kesejahteraan sosial. Dalam prakteknya, pengaruh politik elit mengalami keruntuhan disebabkan oleh hilangnya politik aliran dan pudarnya kepemimpinan kharismatik yang melekat pada elit Muhammadiyah dan NU. *Power sharing* yang terjadi pada Muhammadiyah dan NU tidak terpusat melainkan tersebar merata sehingga menyebabkan sikap politik elitnya yang variatif. Karena itu, studi ini ingin menggambarkan apakah sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta masih mempunyai korelasi yang erat dengan model kepemimpinan yang kolektif-kolegial khususnya pada pemilihan presiden secara langsung.

Studi yang dilakukan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah pemilihan presiden secara langsung yang sudah terlaksana pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Tahun 2004 menjadi momentum yang sangat penting ketika terjadi peralihan dari model pemilihan presiden melalui system voting anggota MPR berganti menjadi pemilihan presiden secara langsung yang membutuhkan tingkat partisipasi tinggi rakyat Indonesia termasuk dalam hal ini adalah para Elit Muhammadiyah dan NU khususnya di Surakarta. Selanjutnya, tempat penelitian yang dipilih adalah kota Surakarta. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa

Surakarta menjadi barometer sosiopolitik nasional dan juga merupakan miniatur Indonesia karena penduduknya yang multi idiologis.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. *Bagaimanakah Sikap Politik Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung ?*
2. *Bagaimana persamaan dan perbedaan sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung ?*

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sikap Politik Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung.

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan sumbangan ilmiah sekaligus melengkapi dan memperbaiki temuan penelitian terdahulu.
2. Dapat menjadi informasi terkait dengan sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung.

⁹ Suara Merdeka, Fokus Jateng, 7 Juli 2014.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah pengkajian kembali literatur-literatur yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut kajian pustaka berfungsi sebagai pengkajian kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan, tidak selalu tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi, tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan.¹

Dalam telaah pustaka dimuat uraian sistematis tentang hasil penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti. Dalam paparan tersebut hendaknya ditunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum menyentuh aspek yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitiannya menjelaskan bahwa peneliti belum memperoleh hasil yang memuaskan dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga diperlukan penelitian lanjutan.¹

Penelitian tentang Muhammadiyah dan NU khususnya di Surakarta belum banyak dilakukan, akan tetapi penelitian tentang Muhammadiyah dan NU secara nasional sudah banyak yang melakukannya. Kajian pustaka pada penelitian ini memilahkan penelitian terdahulu menjadi empat yaitu : *Pertama*, penelitian tentang Muhammadiyah. Diantara penelitian tentang Muhammadiyah yang sudah pernah dilakukan adalah Alifan, 1978, Desertasi berjudul *Muhammadiyah : The Political behavior of A Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Penelitian ini memusatkan kajiannya pada perilaku politik Muhammadiyah pada masa penjajah. Alwi Shihab, 1998, Desertasi berjudul

¹ <http://bahankuliah.wordpress.com/2009/05/14/penulisan-kajian-pustaka/>, akses 2 Oktober 2015, pukul 10.08 WIB.

¹ Hartono, *Bagaimana Menulis Tesis; Petunjuk Komprehensif Tentang Isi dan Proses*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 43.

Membendung Arus. Penelitian ini mengungkapkan peran Muhammadiyah dalam menghadapi arus Kristenisasi di Indonesia, yang mayoritas berpenduduk muslim.

Abdul Munir Mulkhan, 2000, Desertasi dengan judul *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Weinata Sairin, 1995, Desertasi dengan judul *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah yang mengkhususkan kajiannya pada identitas Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid atau pembaharuan di Indonesia*. Andi Wahyudi, 1999, Tesis dengan judul *Muhammadiyah dalam Gonjang-ganjing Politik : Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah di Era 1990an*. Penelitian ini mengkaji pergeseran kepemimpinan Muhammadiyah di era Ahmad Azhar Basyir ke Amien Rais.

Kedua, Penelitian tentang Nahdhatul Ulama diantaranya : Choirul Anam, 1985, Skripsi tentang *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama yang mengkaji sejarah lahir dan perkembangan NU sebagai Jam'iyah dan diniyyah*. Abdul Gaffar Karim, 1995, Skripsi dengan judul *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*. Mengkhususkan penelitiannya pada wajah politik NU tahun 1962-1984. Laode Ida, 1996, Tesis dengan judul *NU, Elit Islam dan Negara*. Penelitian ini mengungkapkan tentang realisasi khittah 1926 untuk pengabdian NU kepada bangsa Indonesia. M. Ali Haidar, 1998, Tesis dengan judul *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqh dalam Politik*. Berisi tentang keterlibatan NU dalam politik nasional didasarkan pada paham keagamaan yang dianut sehingga dinamika gerak politiknya memiliki dasar teologis yang kuat. Ali Maschan Moesa, 1999, Tesis dengan judul *Kiai dan Politik dalam Wacana Civil Society*. Badrun Alaena, 2000, Tesis dengan judul *NU kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja yang mengupas tentang paham keagamaan NU*. Rozikin Daman,

2001, Tesis dengan judul *Islam dan Politik : Pergeseran Politik Nahdlatul Ulama 1984-1999*. Penelitian ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku dengan judul *Membidik NU : Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*.

Ketiga, Penelitian yang mempunyai relevansi dengan Muhammadiyah dan NU seperti : Sudarno Shobron, 2003, Tesis, *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*. Penelitian ini mengungkapkan tentang peran Muhammadiyah dan NU dalam pentas politik nasional sejak berdirinya sampai pada masa orde baru dan orde reformasi. Suaidi Asyari, 2009, Tesis dengan judul *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*. Penelitian ini mengangkat tentang fakta-fakta terbaru mengenai peran penting Muhammadiyah dan NU dalam kehidupan politik dan proses demokratisasi di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru atau yang lazim dikenal dengan era Reformasi. Kedua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ini tentu memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi di negeri ini. Ma'mun Murod Al-Brebesy, 1999, Tesis dengan judul *Negara dan Islam Indonesia : Sebuah Perbandingan Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid dan Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara*. Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, 1992, Tesis dengan judul *NU pasca Khittah : Prospek Ukhuwwah dengan Muhammadiyah*. Sjamsudduha, 1990, Tesis dengan judul *Problema Perwujudan Wahdatul Ummah di Indondesia*. Ada yang menarik dalam penelitian ini yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama diteliti dalam satu paket, lebih khusus lagi dalam aspek politiknya dan Partai Amanat Nasional yang lahir bersamaan dengan Partai Kebangkitan Bangsa pada era roformasi menjadi fenomena menarik karena keduanya lahir dengan asumsi menjadi

pemenang Pemilihan Umum 1999 dengan dukungan warga Muhammadiyah bagi PAN dan warga NU bagi PKB.

Keempat, Penelitian yang terkait dengan sikap politik elit Muhammadiyah dan NU dapat dijumpai pada penelitian yang dilakukan oleh Haedar Nashir, 1998, Tesis berjudul *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*. Penelitian ini merupakan studi tentang perilaku politik di kalangan elit Muhammadiyah lokal di Kecamatan Pekajangan, Pekalongan, Jawa Tengah dengan setting waktu era Orde Baru. Dari penemuannya, perilaku politik elitnya cenderung mengarah pada perilaku moderat- akomodatif.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jurdi, 2005, Tesis berjudul *Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*. Kajian ini juga tentang perilaku politik di kalangan elit Muhammadiyah lokal di Bima, NTB. Setting waktunya adalah pasca Orde Baru Kajiannya membahas tentang dinamika perilaku politik di kalangan elit Muhammadiyah dalam merespon persoalan-persoalan politik lokal terkait dengan pemerintahan dan kepartaian. Ada juga penelitian yang dilakukan Efendi (2010) tentang *Politik Elit Muhammadiyah*. Penelitian ini mengungkap tentang fragmentasi politik elit Muhammadiyah yang terjadi pada Pemilu 2009. Dalam pembahasannya juga dikaji dan dipaparkan tentang modalitas apa yang digunakan masing-masing elit Muhammadiyah dalam melegitimasi manufer politiknya, serta metode dan implikasinya apa dari terjadinya fragmentasi tersebut.

Ridho Al-Hamdi, 2011, Tesis berjudul *Politik Elit Muhammadiyah Pasca Orde Baru*. Penelitian ini mengungkapkan tentang sikap politik elit

Muhammadiyah pasca orde baru yang masuk dalam arus kuat dan godaan untuk berpolitik praktis.

Penelitian elit NU yang berkaitan dengan politik diantaranya : Ahmad Mushadad, 2009, Tesis dengan judul *Peran Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Kondisi Politik Di Kabupaten Jepara 1999- 2004 (Kajian Sejarah Sosial Politik)*. Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara, peran para kiai Nahdlatul Ulama terhadap kondisi politik di Kabupaten Jepara tahun 1999 sampai tahun 2004, dan mengungkap bagaimana pengaruh perilaku politik Kiai Nahdlatul Ulama dalam kehidupan sosial dan sikap politik masyarakat di kabupaten Jepara dari tahun 1999 sampai tahun 2004.

Berdasarkan pada kajian pustaka tersebut maka kajian tentang sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung belum ada peneliti yang mengkajinya. Oleh karena, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah perkembangan dinamika politik di Surakarta khususnya dalam pemilihan presiden secara langsung.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik yang tercakup pada tiga hal, yaitu (1) teori sosio politik dan kultural Surakarta, (2) teori elit dan studi elit di Indonesia, dan (3) sikap politik elit Islam.

1. Sosio Politik dan Kultural Surakarta

Surakarta merupakan nama sebuah kota di tenggara Jawa Tengah yang pada penjajahan belanda digolongkan sebagai vorstenlanden. Secara historis Surakarta adalah nama administrative sebuah kota yang berasal dari desa Sala

pada masa kerajaan Pajang. Desa Sala dikenal setelah pemimpin kuli pelabuhan atau dalam bahasa Jawa disebut juru soroh akrab di panggil Ki Sala atau Ki Gedhe Sala sehingga dari nama ini dikenal desa Sala.¹

2

Para ahli sejarah mengategorikan Surakarta sebagai kota Industri karena geliat sosio ekonomi masyarakatnya berbeda dengan kota lain, seperti Yogyakarta. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jalur perdagangan pada abad 19 melalui beberapa bandar, sedangkan Sala adalah Bandar terakhir yang terletak di Semanggi atau Walaya atau Walayu. Bandar Semanggi menjadi tempat yang ramai oleh pedagang sehingga terbukalah bagi banyak etnis seperti Tionghoa, orang Arab dan yang lainnya bertransaksi serta terlibat langsung dalam system ekonomi masyarakat. Para pedagang Tionghoa dan Arab menjadi pemasok besar bagi kebutuhan masyarakat saat itu.

Perkembangan kota Sala seiring dengan perkembangan masyarakat yang multi etnis serta melahirkan banyak kebudayaan lintas etnis dan bangsa. Fakta peninggalan yang dirasakan sampai saat sekarang ini adalah adanya peninggalan heritage kampung-kampung yang menggambarkan dari masing-masing etnis seperti Pasar Kliwon yang banyak dihuni oleh etnis Arab, Kampung etnis Tionghoa di sekitar Pasar Gedhe, Kampung etnis Bali di Kebalen, etnis Madura di Kampung Sampangan, etnis Banjar dan Flores di Kampung Banjaran, pedagang etnis Jawa di Kampung Sewu dan Laweyan.¹

Pada masa kolonialisme Belanda, interaksi Jawa-Eropa memperkaya hubungan kultural yang semakin luas. Interaksi yang berkembangpun tidak

¹ Soedarmono, Kusumastuti, ²Rizon Pawardi Utomo, "Sejarah dan Morfologi Kota Konflik Solo: Dari Periode Kolonial – Orde Baru", Laporan Hasil Penelitian (Surakarta: Solo Heritage Society, 2009), hlm. 16.

¹ *Ibid.*, hlm. 1-20

hanya terbatas pada hubungan perdagangan tetapi sampai pada ranah politis. Belanda yang datang dengan maksud menguasai tanah Jawa mengawali intervensi dengan memporakporandakan system hubungan antara Raja dan rakyat jelata. Intervensi yang dibangun oleh Belanda menjadikan kerajaan Mataram terbelit permasalahan peperangan sebagai akibat pertentangan dalam suksesi kepemimpinan maupun pemberontakan-pemberontakan kadipaten yang terus meningkat, seiring dengan kondisi tersebut, sejak abad ke-17 mulai muncul kekuatan ideologi baru yang diwakili kelompok santri.¹ Beberapa raja Mataram, memilih bersekutu dengan kekuatan VOC untuk meredam berbagai bentuk peperangan. Tentu saja bantuan VOC harus dibayar mahal dengan penyerahan sebagian wilayah serta beberapa hak istimewa yang mengakibatkan berkurangnya otoritas kerajaan. Hubungan raja dengan VOC tidak serta-merta mendapatkan persetujuan dari keluarga kerajaan, sehingga seringkali membuat perpecahan intern dikalangan pengageng di lingkup Kerajaan Mataram. Mataram harus membayar mahal dengan terbagi wilayah antara Kasunanan Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Kasunanan Surakartapun harus pula merelakan sebagian wilayahnya diserahkan kepada Mas Said menjadi Mangkunegaran, demikian pula Kesultanan Yogyakarta merelakan sebagian wilayahnya untuk Pakualaman.¹

¹ Peran ulama atau santri sudah terjadi ketika kerajaan Demak, berlanjut ke Kerajaan Pajang, hingga Mataram, namun pada periode tersebut gerakan Islam belum lebih terlihat sebagai gerakan sosial keagamaan. Sedangkan yang terjadi pada abad ke-17, Islam lebih pada ranah-ranah politik. Hal ini disebabkan lemahnya beberapa raja Mataram dalam menghadapi kekuatan asing baik VOC maupun Belanda. Para santri senantiasa mengembangkan ide-ide politik di dalam lingkup pesantren, sedangkan pesantren lebih longgar dari aturan kerajaan kalau tidak bisa dikatakan otonom. Lihat M. Harun Alrasyid, *Zaman Bergerak (Analisis Historis tentang Awal Perjuangan Politik Indonesia Masa Kolonialisme 1912-1926)*, Jurnal Madani Edisi I/Mei 2006, hlm. 24.

¹ Vincent J.H. Houben, *Keñaton dan Kompeni: Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002) hlm. 8-9.

Pemekaran wilayah yang terjadi di Surakarta berbuah munculnya tiga pemerintahan yang berbeda yakni Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran dan Residen Belanda. Kasunanan Surakarta membawahi enam kabupaten, yakni Kota Surakarta, Kartasura, Klaten, Boyolali, Ampel, dan Sragen serta satu Kawedanan, yaitu Larangan. Kadipaten Mangkunegaran membawahi tiga Kawedanan, yaitu Ibu Kota, Karanganyar, dan Wonogiri. Sementara itu Belanda membawahi 5 deel (bagian) yang berada di Kasunanan dan Mangkunegaran. Secara territorial, wilayah Surakarta yang luasnya 24 km², sebagian adalah milik Kasunanan, seperlimanya milik Mangkunegaran, dan sisanya merupakan wilayah administrasi Belanda, yaitu di sekitar kantor Residen, Benteng dan Tangsi Militer.¹ Wilayah administrasi Kasunanan di Surakarta terdiri dari 5 kapanewon (subdistrik), yaitu Kutha, Laweyan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Serengan. Wilayah administrasi Mangkunegaran hanya satu yaitu Kawedanan Salebething Kitha yang terdiri dari dua kapanewon, yaitu Kampung Lor (Stabelan, Margareja, dan Pasar Legi), dan Kampung Kidul (Keprabon, Kethelan, dan Pethelan). Batas antara wilayah Kasunanan dan Mangkunegaran di dalam kota adalah jalan memanjang timur-batar yang membelah kota.¹ Karesidenan Surakarta⁷ yang berluas 6.159, 78 Km² sampai dengan awal abad ke-20 Kasunanan terdiri dari 23 Distrik dan 101 Onderdistrik, yang terbagi menjadi 1.240 Kelurahan, sedangkan

¹ Nurhadiatmoko, "*Konflik-Konflik Sosial Pri-Nonpri dan Hukum Keadilan Sosial*", dalam Rustopo, *Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998*, (Yogyakarta-Jakarta: Ombak-Yayasan Nabil, 2007) hlm. 16-18.

¹ Soedarmono, "*Surakarta Kota Kolonial*", Laporan Penelitian (Surakarta: LPPM UNS, 2004), hlm. 17.

Mangkunegaran dibagi 7 Distrik dan 32 Onderdistrik yang terbagi 750 Kelurahan.¹ 8

Kehadiran Belanda yang mempunyai residen serta menguasai beberapa wilayah di Kasunanan dan Mengkunegaran terbukti berpengaruh atas legitimasi Kasunanan Surakarta. Perbedaan cukup mencolok terhadap hegemoni keraton yang mempunyai kekuasaan absolut serta pemerintahan feodal terjadi sebelum dan sesudah Belanda datang. Keraton bukan lagi menjadi satu-satunya pengambil kebijakan, akan tetapi kekuasaan dikendalikan oleh Belanda, demikian pula kepemilikan tanah juga diatur oleh Belanda. Keraton hanya dapat menggunakan simbol-simbol sosial sebagai perekat legitimasinya.¹ 9

Jarak sosial yang dibangun oleh Keraton Kasunan menjadikan Raja hanya menjadi penguasa yang mempunyai symbol-simbol kekuasaan sebagai gambaran subjektif tentang dunia seolah-olah raja benar-benar berkuasa sedangkan pada kenyataan objektif berbicara sebaliknya. Raja dihadapan rakyatnya dipandang begitu tinggi padahal sebenarnya ia tidak pernah menjadi orang merdeka.² 0

Kondisi yang ada di Kasunanan ternyata tidak berbanding lurus dengan kondisi yang terjadi di Mangkunegaran walaupun secara geografis jarak kedua pusat kekuasaan itu sangat berdekatan. Para pemimpin Mangkunegaran dikenal lebih modern dan berorientasi ke masa depan termasuk cara berpikir politik. Para pemimpin Mangkunegaran menerapkan politik aliansi yang bekerja sama

¹ *Ibid.* 8

¹ Kuntowijoyo, *Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi dan Wong Cilik biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915*, Jurnal Humaniora Vol. XV, No. 2/2003, hlm. 202.

² *Ibid.* 0

dengan Belanda. Salah satu terobosan besar yang dilakukan pemimpin Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV (1853-1881) yang melakukan ekspansi dari system agraris yang terbelakang dengan mengikuti teladan perkebunan Eropa sehingga bisa mendirikan pabrik gula Tasikmadu dan Colomadu²

1

Perkembangan pesat terlihat masa berkuasanya Mangkunegara VI dan VII, yang berhasil dibangun perkebunan serta pembangunan sarana perkotaan yang dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, sebab perkembangan dunia menuntut masyarakat untuk mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan sarana dalam bidang pendidikan dilakukan Mangkunegara VII dengan melanjutkan pengelolaan Sekolah Siswo Mangkunegaran dan Studiefonds, serta memprakarsai berdirinya Sekolah Siswarini dan Sekolah Van Deventer. Selain sekolah formal, Mangkunegaran juga memperkenalkan pendidikan non formal berupa les-les bahasa asing, khususnya bahasa Belanda dan kursus keterampilan seperti: menjahit, melukis, membuat patung, sungging dan mengukir.²

2

Abad XX merupakan awal diperkenalkan *private capitalism* oleh pemerintah Kolonial semasa periode liberal. *Private capitalisme* atau sering disebut sebagai politik etis menghasilkan program pendidikan massal yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda serta menghasilkan sumber daya manusia yang terdidik dari kalangan bumiputera dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi bumiputra yang terdidik disadari atau tidak sebagai embrio kemunculan rakyat pribumi melakukan pergerakan dan

² George D. Larson, *Masa Mênjelang Revolusi: Keraton dan Kehidupan Politik di Surakarta, 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 20.

² *Ibid.*, hlm. 29.

mempunyai resistensi terhadap pemerintah yang berdaulat, yakni Belanda. Banyak organisasi modern mulai bermunculan, salah satunya adalah Sarekat Islam.

Sarekat Islam (SI) merupakan organisasi awal yang cukup mengakar di Surakarta. Organisasi yang bercikal bakal dari sebuah organisasi ronda bagi kepentingan keamanan pengusaha pribumi batik itu (Rekso Rumekso), kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam. Pendirian Sarekat Islam sesungguhnya berpangkal pada saingan berat antara majikan pribumi (Indonesia) dengan Tionghoa di bidang perusahaan batik.² Berbagai tokoh yang lahir dalam rahim politik etis kolonial ketika itu tampil sebagai pemimpin-pemimpin SI di Surakarta khususnya, seperti Tjokroaminoto, H. Samanhudi, sampai dengan Marco Kartodikromo.²

3

4

Masa pergerakan sepanjang 1917-1920 yang ditandai dengan dibukanya Volksraad, kebangkitan Semaoen dan SI Semarang, gerakan Djawa Dipa, TNKM, gerakan serikat buruh, kebangkitan PFB dan Soerjopranoto, memang mempengaruhi situasi pergerakan di Surakarta. Namun dalam konteks Surakarta, zaman bergerak itu muncul pertama kali seiring dengan dipulihkannya nama baik Tjipto Mangoenkoesoemo di atas panggung utama pergerakan sebagai anggota Insulinde yang ditunjuk untuk duduk di Volksraad, dan dengan kemunculan Haji Mohammad Misbach sebagai tokoh mubaligh reformis. Kombinasi Tjipto yang nasionalis dan Misbach

² *Ibid.*, hlm. 53.

3

² Kuntowijoyo, *Lari...*, hlm. 206.

yang mubaligh inilah yang mendorong Insulinde – bukan SI – menjadi kekuatan pergerakan “revolusioner” utama di Surakarta pada masa-masa itu²

Secara sosio politik, Surakarta menjadi kota yang penuh dengan pergolakan dan pergerakan politik. Pergerakan dan pergolakan politik tersebut membawa Surakarta sebagai miniatur Indonesia dan barometer politik nasional. Sosio politik Surakarta terus melaju seiring berkembangnya kota ini menjadi sebuah kota besar di Jawa Tengah. Gejolak politik secara akrab berdampingan dengan pergerakan masyarakat Surakarta layaknya sebuah perhelatan politik yang terus diselenggarakan sebagai bagian dari dinamisasi masyarakat terhadap politik.

Secara sosio kultural, Surakarta menjadi bagian dari pengembangan kota yang unik. Modernisasi justru sudah dilaksanakan pada masa Belanda di saat masyarakat Surakarta dihadapkan pada kultur Jawa yang sangat kuat karena ada tarikan yang kuat dari sistem sosial yang berkembang antara Raja satu sisi, dengan rakyat jelata pada sisi yang lain.

Percampuran budaya di Kota Surakarta sudah berlangsung semenjak awal abad XX ketika banyak para pedagang beraktifitas di Bandar Semanggi melalui jalur Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Kebudayaan campuran di Kota Surakarta tersebut memperkaya budaya Jawa sehingga banyak budaya dari luar Surakarta bercampur dan menjelma menjadi budaya baru dan mengakar. Perubahan budaya sebagai akibat percampuran multi budaya membawa dampak pada perubahan struktur masyarakat Jawa bahkan sampai pada wilayah-wilayah kerajaan. Perubahan budaya yang terjadi di

² Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terj. Hilmar Farid (Jakarta: Graffiti Press, 1997), hlm. 159.

Surakarta berdampak pula pada pengaruh stratifikasi sosial masyarakat Jawa khususnya Surakarta.² 6

Stratifikasi masyarakat Surakarta terbagi beberapa kelas, yakni kelas elit, priyayi luhur atau wong gedhe yang merupakan kelas memerintah. Kelas elit ini terdiri dari raja, para bangsawan dan pejabat kerajaan. Selanjutnya kelas bawah atau lapisan bawah yang sering disebut dengan istilah wong cilik. Kelas rakyat kecil atau wong cilik ini merupakan kelas terbanyak sebagai kelas rakyat yang diperintah, baik penduduk kota maupun yang berada di pedesaan. Kelas lapisan bawah merupakan para pekerja yang mempunyai tingkat pendidikan sangat rendah serta sangat sedikit mendapatkan latihan kerja di perusahaan. Rakyat yang tergolong pada kelas bawah mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani, buruh perkebunan dan pabrik serta tukang, perajin dan lainnya.² 7

Stratifikasi masyarakat Surakarta mulai berubah seiring dengan perkembangan pendidikan dan pengajaran yang memunculkan masyarakat kelas sosial yang mempunyai fungsi status baru, sesuai dengan diferensiasi dan spesialisasi dalam bidang sosial ekonomi dan pemerintahan.² Perkembangan kelompok sosial di masyarakat Surakarta terbagi beberapa kelompok yaitu: 1) elit birokrasi yang terdiri dari Pangreh Praja Eropa (Europees Binnenlands Bestuur) dan Pangreh Praja Pribumi, 2) Priyayi birokrasi termasuk Priyayiningrat, 3) Priyayi profesional, 4) golongan Belanda dan golongan Indo yang secara formal masuk status Eropa dan mempunyai tendensi kuat untuk 8

² Kuntowijoyo, *Lari...*, hlm. 207.

² F.A. Sutjipto, *Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu*, (Yogyakarta: Jurusan Sejarah UGM, Seri Bacaan Sejarah Indonesia, No. 11, t.t.), hlm. 1-2.

² Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jilid 2, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), hlm. 92.

mengidentifikasi diri dengan pihak Eropa, dan 5) orang kecil (wong cilik) yang tinggal di kampung² 9

Secara kultural Surakarta merupakan kota yang penuh dengan dinamika budaya yang dibawa oleh para pendatang dari berbagai etnis, sementara masyarakat pribumi asli, terutama dari kalangan bangsawan dan priyayi masih terkungkung dalam symbol-simbol kekuasaan raja. Golongan masyarakat pribumi level bawah yakni wong cilik tidak merasakan kekuatan penerapan symbol-simbol itu pada kehidupan sehari-hari. Wong cilik hanya melihat symbol-simbol itu hanya pada saat memngunjungi sekaten, melihat iring-iringan jenazah keluarga raja atau yang lainnya. Kondisi demikian karena symbol dan hierarki semakin ke bawah semakin luntur. Oleh karenanya maka wong cilik terhindar dari system symbol dan hierarki bukan kerana mereka menghindar akan tetapi memang secara samar-samar saja sampai kepada mereka.³ 0

2. Teori Elit dan Studi Elit di Indonesia

Kajian tentang elit sebagai kerangka teori pada penelitian ini merujuk pada teori elit yang dikonsepsikan Pareto, Mosca, Putnam serta C. Wright Mills. Kajian elit juga perlu melihat kajian elit dalam konteks studi kelas sebagaimana disampaikan oleh Karl Marx dan Kuntowijoyo. Konsep yang disampaikan oleh Karl Marx bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Antara kelas yang satu menindas kelas yang lain yang

² Sartono Kartodirdjo, *Perkembangan Peradaban Priyayi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hlm. 11.

³ Kuntowijoyo, *Paradigma...*, hlm. 206.

berakibat munculnya keterasingan di antara satu dengan lainnya.³ Sedangkan menurut Kuntowijoyo elit dipahami makna kelas dalam konteks agama sehingga pengelompokan kelas terdiri dari kelas Mustakbirun yang mewakili kaum penguasa dan kelas Mustadh'afin yang mewakili kelas kaum tertindas.³

Teori elit yang disampaikan oleh Mosca³ mengungkapkan setiap masyarakat harus ada suatu minoritas yang menguasai mayoritas anggota masyarakat yang lain. Kelompok minoritas inilah yang disebut sebagai elit, yang menguasai, terorganisir, dan memonopoli kekuasaan, terdiri dari mereka yang menduduki jabatan-jabatan komando politik dan dapat mempengaruhi setiap kebijakan politik. Kemudian, kelompok mayoritas disebut sebagai massa, pihak yang dikuasai dan tidak terorganisir.³

Putnam menyampaikan bahwa elit merupakan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Fokus kajiannya adalah kekuasaan, yang terbagi ke dalam dua konsepsi. *Pertama*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain. *Kedua*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif, seperti undang-undang. Karena itu, Putnam membagi elit

³ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: Gramedia, 1999, hlm.110-111.

³ Kuntowijoyo, *Paradigma...*, hlm. 302.

³ Gaetano Mosca, lahir pada tanggal 1 April 1858 dan meninggal dunia pada tanggal 8 November 1941, adalah seorang ahli sosiologi, pemikir politik, pejabat publik dan jurnalis dari Itali. Pada tahun 1881 dia lulus sebagai sarjana hukum. Tahun 1887 dia pindah ke Roma dan menjadi editor catatan sidang Chamber Of Deputies Itali. Sebagai ahli politik, dia berkecimpung sebagai pengajar khususnya sebagai profesor hukum tatanegara (Constitutional Law) pada berbagai universitas di Itali ((Pada tahun 1896 dia menjadi pengajar Hukum Konstitusi pada Universitas Turin, dan pada tahun 1924 dia menjadi pengajar Hukum Publik pada Universitas Roma). Mosca menjadi terkenal karena teorinya mengenai kelas penguasa (ruling class). Seperti orang sejamannya, Pareto, dia menerapkan pada ilmu sosial metode empiris yang mirip ilmu fisika. Dia menolak penafsiran monistik (penyebab tunggal) dari sejarah yang mencoba untuk melacak semua perkembangan sejarah pada satu penyebab saja, baik itu iklim, ras, atau faktor ekonomi.

³ TB. Bottomore, *Elit dan Masyarakat*. Terj. Abdul Harris dan Sayid Umar, (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), hlm. 8.

ke dalam dua kelompok, yakni mereka yang memiliki kekuasaan politik “penting”, dan mereka yang tidak memilikinya.³ 5

Konsep yang dikemukakan oleh Mosca dan Putnam menghasilkan satu kesimpulan bahwa elit dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok elit yaitu: *Pertama*, elit yang memerintah (governing elit), terdiri dari individu-individu yang secara langsung atau tidak langsung memainkan peranan yang besar dalam pemerintahan. *Kedua*, elit yang tak memerintah (non-governing elit) yang mencakup sisanya. Kedua kelompok ini juga pernah disampaikan oleh Pareto³ dan dikutip ulang oleh Bottomore.³ Oleh karena itu, berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh Mosca, Pareto maupun Putnam sesungguhnya konsep elit mempunyai beberapa kriteria yaitu: *Pertama*, elit merupakan kelompok pilihan yang jumlahnya minoritas. *Kedua*, elit memiliki kekuasaan politik penuh. *Ketiga*, dapat mempengaruhi dan menentukan arah perubahan sosial dalam lingkup kekuasaannya. *Keempat*, elit adalah kelompok yang terorganisir dan terstruktur. *Kelima*, elit dapat melakukan perintah terhadap orang selain mereka atau massa yang tak terorganisir.³ 8

³ Robert D. Putnam, *Studi Perbandingan Elit Politik*, dalam Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gama Press, 2001). Hlm. 80.

³ Vilfredo Federico Damaso Pareto adalah seorang insinyur Italia, sosiolog, ekonom, ilmuwan politik dan filsuf. Dia memberikan beberapa sumbangan penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam studi distribusi pendapatan dan dalam analisis pilihan individu. Vilfredo Pareto memperkenalkan konsep efisiensi Pareto dan juga membantu mengembangkan bidang ekonomi mikro. Vilfredo Pareto juga merupakan orang pertama yang menemukan bahwa pendapatan mengikuti distribusi Pareto, yang merupakan kuasa hukum distribusi probabilitas. Vilfredo Pareto juga memberikan kontribusi untuk bidang sosiologi dan matematika. Pareto lahir pada 15 July 1848, dari sebuah keluarga bangsawan Genoa yang diasingkan tahun 1848 di Paris. Ayahnya, Raffaele Pareto (1812-1882), adalah seorang insinyur sipil Italia. Ibunya, Marie Metenier, adalah seorang wanita Prancis. Vilfredo Pareto dan keluarganya kembali ke Italia pada tahun 1858. Pada masa kecilnya, Vilfredo Pareto tinggal di lingkungan kelas menengah, dia menerima standar pendidikan yang tinggi. Pada tahun 1870, ia meraih gelar di bidang teknik, yang sekarang menjadi Universitas Politeknik Turin. Disertasinya berjudul "Prinsip-prinsip Dasar Ekuilibrium di Badan padat". Kemudian dia cenderung tertarik pada analisis ekuilibrium dalam ilmu ekonomi dan sosiologi

³ Bottomore, *Elit...*, hlm. 2. 7

³ *Ibid.* 8

Perspektif berikutnya adalah menurut pandangan C. Wright Mills. Konsepsi Mills ini didasarkan pada riset yang dilakukan pada tahun 1972, tentang pemimpin-pemimpin di seluruh sektor baik politik, ekonomi, sosial, kultur dan institusi sipil di Amerika Serikat. Mills mengategorisasikan tiga penguasa elit, yaitu (a) pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk presiden, anggota kabinet dan penasehat terdekat, (b) pemilik-pemilik perusahaan besar dan pimpinan-pimpinannya, (c) pimpinan-pimpinan lembaga militer.³

3. Konsep Elit dalam Islam

Kajian tentang elit dalam Islam dapat disimbolkan dengan adanya ulama, kyai, mubaligh, dan guru ngaji.⁴ Dalam konteks pasca⁰Orde Baru, keberadaan ulama tetap menjadi elit penentu dalam kaitannya dengan dunia politik. Hal ini terbukti ketika politik santri memperoleh kemenangan dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden RI keempat dan Amien Rais menjadi ketua MPR RI. Kedua tokoh ini mewakili organisasi Islam terbesar di negeri ini, NU dan Muhammadiyah.

Elit Islam dapat dikategorikan pada dua kelompok, yaitu elit ulama dan elit cendekiawan Muslim. Seseorang dianggap sebagai ulama apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : *Pertama*, memiliki mempunyai ilmu yang dalam, tingkat ketakwaan yang tinggi, banyaknya amal shaleh, dan berakhlak yang terpuji. *Kedua*, kedalaman ilmu syariah dalam arti luas meliputi ilmu aqidah, ilmu hukum, dan ilmu akhlak. *Ketiga*, kedalaman pengetahuan tentang ayat-ayat kauniyah, yakni ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengetahuan

³ C. Wright Mills, *The Power Elit*, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 271-272.

⁴ Abdul Munir Mulkhan, *Peubahan Pola Perilaku dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hlm. 17.

empiris dan eskperimental.⁴ Elit cendekiawan Muslim, muncul bukan dari diri sendiri pada diri seseorang yang sudah mencapai tataran tingkat pendidikan yang tinggi, akan tetapi sebutan itu muncul dari pihak luar, bukan hanya sekadar sebagai pemberian status sosial, melainkan lebih merupakan cetusan harapan untuk mengemban suatu misi tertentu.

Kelompok elit Islam yang telah disebutkan menjadi pijakan langkah selanjutnya untuk menentukan metode apa yang digunakan sebagai dasar menganalisa elit yang dimaksud dalam penelitian ini. Karena itu, peneliti menggunakan tiga pendekatan dalam menganalisanya.

Pertama, analisa posisional, yang menganggap bahwa elit adalah mereka yang menduduki posisi tertinggi dalam struktur organisasi formal. Analisa posisi ini merupakan teknik yang paling mudah dan paling umum untuk mengetahui siapa yang berkuasa. *Kedua*, analisa reputasional, yang menganggap bahwa elit adalah mereka yang tidak berada pada posisi formal dalam organisasi, namun mereka mengetahui mekanisme politik dari dekat. *Ketiga*, analisa keputusan, yang menganggap bahwa elit adalah mereka yang memiliki pengaruh dan berhasil mengajukan inisiatif atau menentang usul-usul keputusan.⁴

2

Penelitian ini hanya menggunakan dua pendekatan yaitu *pendekatan posisional* dan *pendekatan keputusan* sebagai jalan tengah terhadap tiga pendekatan tersebut di atas, yakni dengan menggabungkan dua pendekatan agar memudahkan menemukan varian perilaku elit, di samping tidak meluasnya pembahasan penelitian ini. Karena itu, penelitian ini pertama-tama

⁴ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 14-15.

⁴ Robert D. Putnam, *Studi Perbandingan Elit Politik* dalam Mohtar Mas'od dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: GAMA Press, 2001), hlm. 91-94.

akan mengidentifikasi siapa saja elit yang berada di dalam struktur organisasi. Kemudian disaring lagi, siapa saja elit yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan organisasi. Elit-elit inilah yang akan menjadi cakupan bahasan dalam penelitian ini.

4. Sikap Politik Elit Islam

Sikap politik (*political attitudes*) dalam kajian bahasa berarti mengkaji tentang pemikiran dan pandangan seseorang yang didasarkan pada pendirian mereka berupa pendapat atau keyakinan⁴. Sikap politik dalam penelitian ini akan fokus pada sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden Secara Langsung. Sikap politik elit dapat dikategorisasikan berdasarkan pada konsep tarik menarik antara dua kutub ekstrem, yaitu *sikap inklusif* dan *sikap eksklusif*. Sikap inklusif lebih mengedepankan substansi (bahkan lebih dari sekadar substansi) daripada simbol. Sikap eksklusif lebih mengedepankan simbol daripada substansi. Dua kutub ekstrem inilah yang selalu mewarnai sikap politik di kalangan elit menengah Muslim di Indonesia.⁴

4

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*qualitative methods*) yang mengacu pada berbagai teknik termasuk di dalamnya proses observasi, kepustakaan atau dokumentasi serta wawancara intensif secara personal guna

⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 838.

⁴ Haedar Nashir, *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm. 150.

memahami pengalaman-pengalaman dari para informan utama, serta ditemukan sikap tegas dari para informan tersebut.⁴

5

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Tujuannya, menjelaskan secara komprehensif sikap politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung sehingga didapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah terpublikasikan di masyarakat umum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologis, yakni suatu pendekatan secara mendalam suatu fenomena yang menyita perhatian masyarakat luas karena keunikan dan kedahsyatan fakta tersebut mempengaruhi masyarakat.

Fenomenologi, pada awalnya merupakan kajian filsafat dan sosial. Penggagas utamanya adalah Edmund Husserl yang menginginkan fenomenologi akan melahirkan ilmu yang lebih bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Edmund Husserl (1859-1938) seorang filosof Jerman, pendiri filsafat fenomenologi mengajukan konsepsi yang berbeda dengan para pendahulunya. Tugas utama fenomenologi menurut Husserl adalah menjalin keterkaitan manusia dengan realitas. Bagi Husserl, realitas bukan sesuatu yang berbeda pada dirinya lepas dari manusia yang mengamati. Realitas itu mewujudkan diri atau menurut ungkapan Martin Heidegger juga seorang fenomenolog: “sifat realitas itu membutuhkan keberadaan manusia”. Noumena

⁴ David Marsh dan Gerry Stoker, *Theory and Methods in Political Science*, (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2002), hlm. 197.

membutuhkan tempat tinggal (*unterkunft*) ruang untuk berada, ruang itu adalah manusia.

Husserl menggunakan istilah fenomenologi untuk menunjukkan apa yang nampak dalam kesadaran kita dengan membiarkannya termanifestasi apa adanya tanpa memasukkan kategori pikiran kita padanya atau menurut ungkapan Husserl: *zuruck zu den sachen selbt* (kembalilah kepada realitas itu sendiri). Berbeda dengan Kant, Husserl menyatakan, bahwa apa yang disebut fenomena adalah realitas itu sendiri yang nampak setelah kesadaran kita cair dengan realitas. Fenomenologi Husserl bertujuan mencari yang essensial atau eidos (esensi) dari fenomena itu. Fenomenologi kemudian berkembang sebagai metode riset yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk di dalamnya komunikasi sebagai salah satu varian dalam penelitian kualitatif dalam payung paradigma interpretif.⁴

6

Husserl mengajukan metode yang disebut epochè. Kata epochè berasal dari bahasa Yunani, yang berarti: “menunda putusan” atau “mengosongkan diri dari keyakinan tertentu.” Epochè bisa juga berarti tanda kurung (bracketing) terhadap setiap keterangan yang diperoleh dari sesuatu fenomena yang tampil, tanpa memberikan putusan benar salahnya terlebih dahulu. Dalam hal ini Husserl mengatakan, bahwa epochè merupakan thesis of the natural standpoint. (tesis tentang pendirian yang natural), dalam arti bahwa fenomena yang tampil dalam kesadaran adalah benar-benar natural tanpa dicampuri oleh presupposisi pengamat.

⁴ O. Hasbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktek Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, Jurnal Meditor, Vol. 9, No. 1, tahun 2008, hlm. 164.

Metode epochè merupakan langkah pertama untuk mencapai esensi fenomena dengan menunda putusan lebih dahulu. Langkah kedua, Husserl menyebutnya dengan eidetic vision atau membuat ide (ideation). Eidetic vision ini juga disebut “reduksi”, yakni menyaring fenomena untuk sampai ke eideosnya, sampai ke intisarinnya atau yang sejatinya (wesen). Hasil dari proses reduksi ini disebut wesenschau, artinya sampai pada hakikatnya.

Fenomenologi merupakan upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara actual sebagai data dasar suatu realitas. Peneliti dalam studi fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya menggeledah tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya.⁴

7

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu metode dokumentasi dan metode wawancara.

a. Metode Dokumentasi.

Dokumen merupakan setiap bahan baik yang tertulis maupun film.⁴ Metode ini digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan dan mencatat karya-karya elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta yang pernah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, makalah, maupun di media cetak lainnya. Selain itu, peneliti akan mengumpulkan karya-karya

⁴ *Ibid.*

7

⁴ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 216.

dari para ilmuwan yang pernah membahas tentang pemikiran dan sikap elit yang dimaksudkan dalam penelitian ini serta arsip, surat keputusan, dan dokumen-dokumen penting yang dianggap memiliki relevansinya dengan penelitian ini.⁴

b. Metode Wawancara.

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data subyektif kontemporer yang belum pernah dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Ada empat tahapan penting yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara yaitu ; (1) menentukan siapa yang akan diwawancarai, (2) mendapatkan akses dan mengatur proses wawancara, (3) melakukan wawancara, dan (4) menganalisis hasil wawancara.⁵

Teknik menjaring informan dengan teknik sampling yang dalam penelitian kualitatif teknik sampling ini menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*) yang bertujuan; *pertama*, merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik. *Kedua*, menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak ada sampel acak akan tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*).⁵

Wawancara dilakukan dengan *sample* para Elit Muhammadiyah yang terpilih yakni mereka yang menjadi pengurus harian di Pimpinan

⁴ *Ibid.*, hlm. 216.

⁵ Lisa Harrison, *Metodologi⁰Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2007), hlm. 104.

⁵ Moleong, *Metodologi....*, hlm. 224.

Daerah Muhammadiyah Surakarta pada periode kepemimpinan tahun 2004 sampai dengan 2014, sedangkan elit NU yang dipilih adalah mereka yang menjadi pengurus harian Pimpinan Cabang NU Surakarta pada periode kepemimpinan tahun 2004 sampai dengan 2014.

c. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang pemilihan presiden secara langsung. Elit Muhammadiyah dan NU tersebut adalah para pengurus harian organisasi tersebut.

Data sekunder yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi yang disimpan dalam arsip Muhammadiyah dan NU di Surakarta terutama sejak diterapkan pemilihan presiden secara langsung.

d. Analisis Data

Semua data yang sudah terkumpul baik berupa hasil wawancara, pengamatan, maupun dokumentasi dari buku, jurnal, media massa, dokumen, dan arsip lainnya, ditelaah secara detail dengan menggunakan tiga tahapan :

1. Reduksi Data.

Tahapan ini digunakan untuk memilih dan memilah data yang sudah terkumpul secara cermat dan teliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian ini berlangsung.

2. Penyajian Data.

Setelah proses pemilihan dan pemilahan data selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data penelitian secara deskriptif dan detail sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Interpretasi Data.

Proses terakhir yang tidak bisa dipisahkan adalah analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan sesuai dengan metode yang berlaku, lalu diuji validitasnya, sehingga mendapatkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah. Pada saat melakukan interpretasi data dipergunakan juga metode induksi dan Komparasi.

Analisa data Induksi penelitian ini digunakan untuk melihat perjalanan pemikiran politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta. Sedangkan komparasi menganalisis hubungan antara pemikiran politik elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta khususnya melakukan analisa terhadap adanya perbedaan dan persamaannya tentang pemilihan Presiden secara langsung.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun berdasarkan alur logika yang sistematis. Bab I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review atas karya-karya terdahulu atau telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

Bab II membahas tentang teori sosio politik dan kultural kota Surakarta, teori elit dan studi elit di Indonesia, serta sikap politik elit Islam.

Bab III membahas tentang Kota Surakarta ditinjau dari struktur masyarakat dan pergerakannya dan Pemilihan Presiden secara Langsung di Surakarta.

Bab IV membahas tentang Muhammadiyah, NU di Surakarta serta sikap politik para elitnya. Pada Bab ini dijelaskan tentang Perkembangan Muhammadiyah dan NU di Surakarta, para pengurusnya dan amal usaha atau unit usaha Muhammadiyah dan NU di Surakarta, serta sikap politik elitnya.

Bab V membahas tentang analisa sikap politik para elit Muhammadiyah dan NU di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung periode 2004 – 2014 serta persamaan dan perbedaan sikap politik elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Surakarta tentang Pemilihan Presiden secara Langsung.

Bab VI Penutup yang berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi.